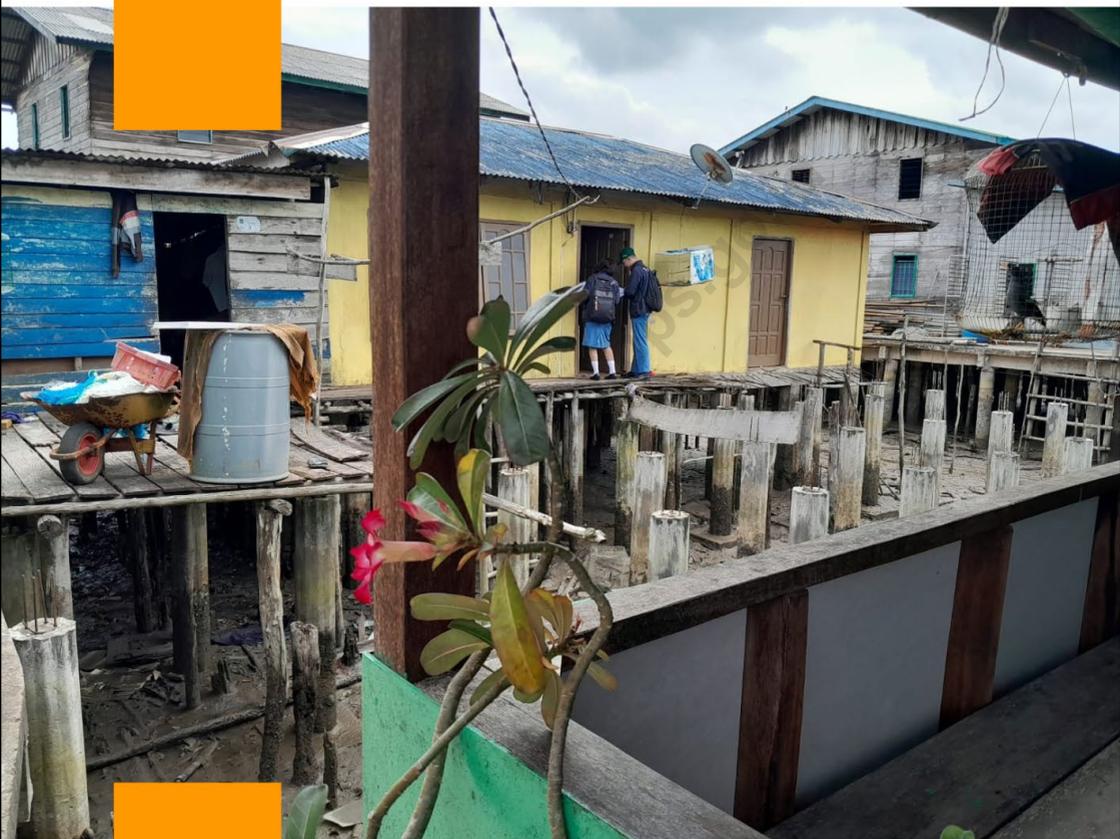


# DATA DAN INFORMASI **KEMISKINAN** KOTA BATAM 2023

VOLUME 4, 2024





Katalog: 3205014.2171

ISSN: 3031-3813

DATA DAN INFORMASI  
**KEMISKINAN**  
KOTA BATAM 2023

VOLUME 4, 2024

<https://batamkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BATAM**

# **DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KOTA BATAM 2023**

**Volume 4, 2024**

**Katalog:** 3205014.2171

**ISSN:** 3031-3813

**No. Publikasi:** 21710.24007

**Ukuran Buku:** 14.8 cm x 21 cm

**Jumlah Halaman:** xii+45 halaman

**Penyusun Naskah:**

Badan Pusat Statistik Kota Batam

**Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Kota Batam

**Desain kover oleh:**

Badan Pusat Statistik Kota Batam

**Diterbitkan oleh:**

©Badan Pusat Statistik Kota Batam

**Sumber ilustrasi:**

Dokumentasi SUSENAS Maret BPS Kota Batam

**Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Batam**

**TIM PENYUSUN**  
**Data dan Informasi Kemiskinan Kota Batam 2023**  
**Volume 4, 2024**

**Pengarah:**  
Eko Aprianto

**Penanggung Jawab:**  
Eko Aprianto

**Penyunting:**  
Aditya Sangaji

**Penulis Naskah:**  
Evawane Fahma Kusumawardani

**Infografis:**  
Evawane Fahma Kusumawardani

**Pengolah Data:**  
Adlina Khairunnisa



# KATA PENGANTAR

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan informatif. Dengan tersedianya data dan informasi kemiskinan, diharapkan dapat mendeteksi faktor-faktor yang terkait dengan masalah kemiskinan itu sendiri.

Publikasi ini menjelaskan metodologi penghitungan tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS dan analisis tentang penduduk/rumah tangga miskin. Analisis yang dilakukan meliputi perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Batam, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pengeluaran serta profil rumah tangga miskin. Data profil rumah tangga miskin yang disajikan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.

Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi pengguna data dan semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada mereka yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian buku ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

**Batam, Juni 2024**

Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Batam

**Eko Aprianto, SST., M.T.I.**



# DAFTAR ISI

## DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN

### KOTA BATAM 2023

Volume 4, 2024

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1 Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Tujuan .....	4
1.3. Ruang Lingkup .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB 2 Metodologi</b> .....	<b>7</b>
2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan .....	9
2.2. Indikator Kemiskinan .....	13
2.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan .....	14
<b>BAB 3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan</b> .....	<b>19</b>
3.1. Garis Kemiskinan Kota Batam .....	21
3.2. Penduduk Miskin Kota Batam .....	22
3.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan .....	24
3.4. Gini Rasio .....	25
<b>BAB 4 Profil Rumah Tangga Miskin</b> .....	<b>27</b>
4.1. Karakteristik Sosial Demografi .....	30
4.2. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan) .....	31
4.3. Karakteristik Sosial Ketenagakerjaan .....	38
4.4. Karakteristik Sosial Pendidikan .....	41
<b>BAB 5 Penutup</b> .....	<b>43</b>
<b>Inforgrafis</b> .....	<b>47</b>



# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin di Kota Batam, Maret 2023 .....	30
Tabel 4.2.	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Batam, Maret 2023 .....	37
Tabel 4.3.	Persentase Rumah Tangga Miskin Kota Batam menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, Maret 2023 .....	40
Tabel 4.4.	Persentase Rumah Tangga Miskin Kota Batam Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga, Maret 2023 .....	41

<https://batamkota.bps.go.id>



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Koefisien Gini menurut Kurva Lorenz .....	15
Gambar 3.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia, Maret 2013–Maret 2023 .....	21
Gambar 3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Batam, Maret 2011–Maret 2021.....	23
Gambar 3.3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Batam, Maret 2011–Maret 2021.....	25
Gambar 3.4. Gini Ratio Kota Batam Tahun 2011-2020 .....	26
Gambar 4.1. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Atap Terlulus di Kota Batam, Maret 2023 .....	31
Gambar 4.2. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Dinding Terlulus di Kota Batam, Maret 2023 .....	32
Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Penerangan di Kota Batam, Maret 2023 .....	33
Gambar 4.4. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Sumber Air Minum di Kota Batam, Maret 2023 .....	35
Gambar 4.5. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Kota Batam, Maret 2023 .....	36
Gambar 4.6. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal di Kota Batam, Maret 2023 .....	36
Gambar 4.7. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Lantai Terlulus di Kota Batam, Maret 2023 .....	37
Gambar 4.8. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Ketenagakerjaan Kepala Rumah Tangga di Kota Batam, Maret 2023 .....	39
Gambar 4.9. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga di Kota Batam, Maret 2023 .....	40



# 1 PENDAHULUAN





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik di daerah maupun di pemerintah pusat. Salah satu aspek penting untuk pendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang tepat dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu data kemiskinan yang akurat juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahunnya. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret. Pada tahun 2015 hingga saat ini BPS melaksanakan Susenas setiap semester yaitu pada bulan Maret dan September, sehingga BPS mampu menyajikan data kemiskinan dua kali setiap tahunnya untuk level nasional

dan provinsi. Sedangkan untuk level kabupaten/kota, angka kemiskinan dihasilkan satu kali setiap tahunnya berdasarkan hasil pendataan Susenas bulan Maret. Buku ini akan menyajikan dan membahas kemiskinan pada level kabupaten/kota terutama Kemiskinan di Kota Batam.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan penulisan buku Data dan Informasi Kemiskinan Kota Batam 2023 adalah:

1. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Batam tahun 2023 dan perkembangannya;
2. Mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Kota Batam pada tahun 2023; dan
3. Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan di Kota Batam tahun 2023.

## **1.3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari penulisan ini mencakup tingkat kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin, distribusi, dan ketimpangan pendapatan penduduk serta beberapa indikator kemiskinan lainnya di Kota Batam pada tahun 2023.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Bab 1, menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan buku.

Bab 2, menjelaskan tentang konsep kemiskinan yang digunakan, metode penghitungan garis kemiskinan, profil kemiskinan, ukuran

kedalaman kemiskinan, ukuran keparahan kemiskinan, dan ukuran distribusi dan ketimpangan pendapatan.

Bab 3, membahas tentang perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, dan distribusi pendapatan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Batam.

Bab 4, membahas tentang profil rumah tangga miskin Kota Batam tahun 2023 berkaitan dengan karakteristik pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan.

<https://batamkota.bps.go.id>



# 2 METODOLOGI





## BAB II

# METODOLOGI

### 2.1 METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN

#### a. KONSEP

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan individu dari sisi ekonomi/ pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

#### b. SUMBER DATA

Sumber data utama yang dipakai adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul Konsumsi/Pengeluaran dan Kor.

#### c. METODE

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK). Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi baik daerah perkotaan dan perdesaan. **Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK.** GK terdiri atas dua komponen yaitu

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sehingga:  **$GK = GKM + GKNM$** .

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setiap individu yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis

komoditas (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditas (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

#### d. TEKNIK PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN

Penghitungan kemiskinan pada tingkat provinsi dijelaskan sebagai berikut. Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas GK Sementara. GK Sementara yaitu GK periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditas dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditas tersebut. Formula dasar dalam menghitung GKM adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

di mana:

- $GKM_{jp}$  = Garis Kemiskinan Makanan di daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.
- $P_{jkp}$  = harga komoditas k di daerah j pada provinsi p.
- $Q_{jkp}$  = rata-rata kuantitas komoditas k yang dikonsumsi di daerah j pada provinsi p.
- $V_{jkp}$  = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditas k di daerah j pada provinsi p.
- j = daerah (perkotaan atau perdesaan).
- p = provinsi

Selanjutnya, GKM<sub>jp</sub> tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$HK_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

di mana:

HK<sub>jp</sub> = harga implisit rata-rata kalori di daerah j pada provinsi p  
V<sub>jkp</sub> = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditas k di daerah j pada provinsi p  
K<sub>jkp</sub> = kalori dari komoditas k di daerah j pada provinsi p

$$GKM_{jp} = HK_{jp} \times 2.100$$

di mana:

GKM<sub>jp</sub> = Kebutuhan minimum makanan di daerah j pada provinsi p, yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM) .  
j = daerah (perkotaan atau perdesaan).  
p = provinsi ke-p.

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditas non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditas/ sub-kelompok non- makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditas/ sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditas/ sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditas non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi.

Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

di mana:

- $GKNM_{jp}$  = pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j pada provinsi p.
- $V_{kjp}$  = nilai pengeluaran per komoditas/ sub-kelompok non-makanan k di daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).
- $r_{kj}$  = rasio pengeluaran komoditas/ sub-kelompok non-makanan k (hasil SPKKD 2004) dan daerah j.
- $k$  = jenis komoditas non-makanan terpilih.
- $J$  = daerah (perkotaan atau perdesaan).
- $p$  = provinsi.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota dihitung dengan:

$$\%PM_k = \frac{PM_k}{P_k}$$

di mana:

- $\%PM_k$  = % Penduduk miskin di kabupaten/kota k.
- $PM_k$  = Jumlah penduduk miskin kabupaten/kota k.
- $P_k$  = Jumlah penduduk di kabupaten/kota k.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level provinsi merupakan jumlah dari penduduk miskin kabupaten/kota atau:

$$PM_p = \sum_{k=1}^n PM_k$$

di mana:

$PM_p$  = Penduduk miskin provinsi.

$PM_k$  = Penduduk miskin kabupaten/kota k.

$N$  = Jumlah kabupaten/kota.

## 2.2 INDIKATOR KEMISKINAN

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada tiga indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, **Head Count Index (HCI =  $P_0$ )**, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, **Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index =  $P_1$ )** yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, **Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index =  $P_2$ )** yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P \propto = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

di mana:

$\alpha$  = 0, 1, 2

$z$  = Garis Kemiskinan

$y_i$	= Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari penduduk ke- $i$ yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i = 1, 2, \dots, q$ ); $y_i < z$
$q$	= Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
$n$	= Jumlah penduduk

- Jika  $\alpha=0$ , diperoleh *Head Count Index*
- jika  $\alpha=1$ , diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan/ *Poverty Gap Index*
- jika  $\alpha=2$ , disebut Indeks keparahan kemiskinan/ *Poverty Severity Index*

## 2.3 DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini, akan digunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan Ukuran Bank Dunia.

### a. KOEFISIEN GINI (GINI RATIO)

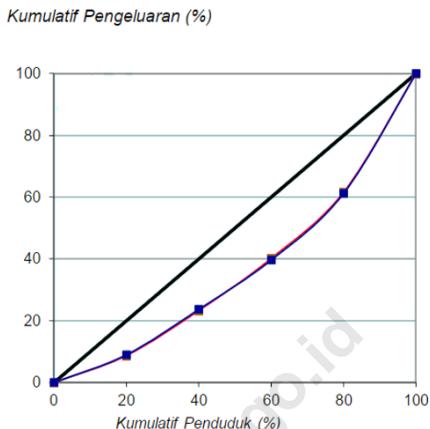
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f p_i * (F c_i + F c_{i-1})$$

di mana:

<b>GR</b>	= Koefisien Gini (Gini Ratio)
$f p_i$	= frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke- $i$
$F c_i$	= frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- $i$
$F c_{i-1}$	= frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- $(i-1)$

## Gambar 2.1. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk Koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai  $A/(A+B)$ , dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika  $A=0$  koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika  $B=0$  koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun, pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan, kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan

keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya sebagai berikut:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut:

- Dapat didekomposisi, hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok, yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (*sub-group*).
- Dapat diuji secara statistik, seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

## **b. UKURAN BANK DUNIA**

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut.

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan
- Seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.



# 3

## PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN & KETIMPANGAN PENGELUARAN





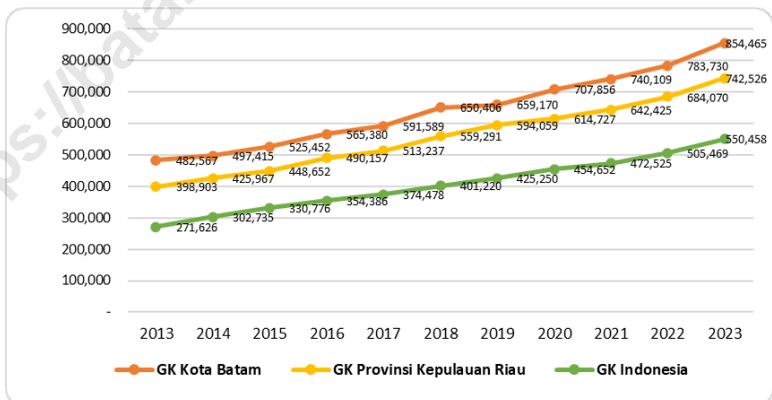
# BAB III

## PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN

### 3.1 GARIS KEMISKINAN KOTA BATAM

Dalam berbagai literatur, kemiskinan selalu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Dalam terminologi umum, hal tersebut didefinisikan sebagai kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut umumnya diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

**Gambar 3.1.** Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia, Maret 2013–Maret 2023



Sumber: Susenas Maret 2013-Maret 2023

Perkembangan garis kemiskinan periode Maret 2013-Maret 2023 menunjukkan tren yang selalu meningkat. Garis kemiskinan adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum per bulan yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhinya agar tidak dikategorikan

miskin. Garis kemiskinan Kota Batam periode Maret 2013 sebesar Rp482.567,-/kapita/bulan, sedangkan pada Maret 2023 garis kemiskinan telah mencapai Rp854.465,-/kapita/bulan (meningkat 44 persen dibandingkan kondisi Maret 2013). Berdasarkan Gambar 3.1, terlihat bahwa garis kemiskinan Kota Batam selalu lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan garis kemiskinan Indonesia.

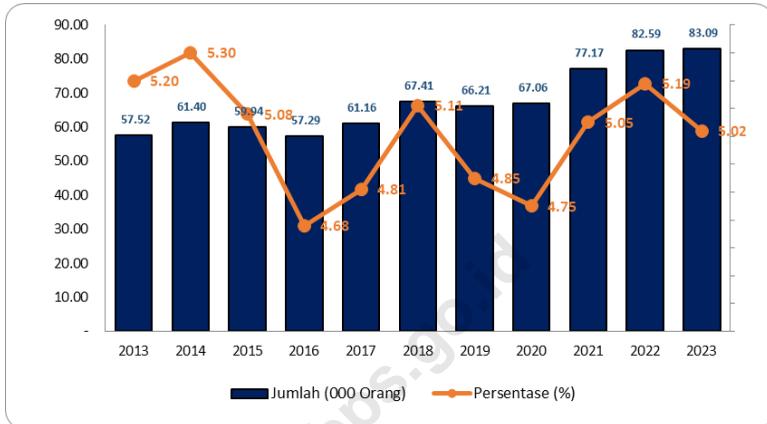
### **3.2 PENDUDUK MISKIN KOTA BATAM**

Mengacu pada definisi “Garis Kemiskinan” pada sub bab sebelumnya, maka penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per bulan di bawah nilai garis kemiskinan terkategori sebagai penduduk miskin.

Secara umum sebagaimana tersaji pada Gambar 3.2 berikut, pada periode Maret 2013–Maret 2023, persentase penduduk miskin di Kota Batam bergerak secara fluktuatif. Persentase dan jumlah penduduk miskin paling rendah terjadi pada Maret 2016. Kenaikan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2014 dan Maret 2018 dipicu oleh melemahnya kondisi perekonomian Kota Batam pada dua periode tersebut. Sementara itu, penurunan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2023 disebabkan oleh adanya pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang melanda Kota Batam dan daerah lainnya di Indonesia.

Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan tren yang menurun pada periode Maret 2013-Maret 2023, tetapi potret kemiskinan dari sisi jumlah penduduk miskin mengalami tren yang meningkat pada periode tersebut. Fenomena ini secara jelas terjadi pada periode Maret 2019 ke Maret 2020 dan Maret 2022 ke Maret 2023. Hal ini disebabkan *pertumbuhan jumlah penduduk miskin lebih lambat dibandingkan pertumbuhan jumlah Penduduk pada periode tersebut*. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2013 sampai dengan Maret 2023 disajikan pada Gambar 3.2.

**Gambar 3.2.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Batam, Maret 2013–Maret 2023



Sumber: Susenas Maret 2013-Maret 2023

Peningkatan maupun penurunan angka kemiskinan sangat bergantung pada program-program intervensi pengendalian/ pengentasan kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penduduk miskin adalah penduduk yang sangat rentan dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, terutama dengan perubahan harga pada bahan makanan. Oleh karena itu, **program intervensi berupa bantuan pemerintah dalam bentuk bahan makanan pokok mampu menekan angka kemiskinan.**

Namun demikian, pendistribusian bantuan pangan tidak serta merta mampu mengentaskan kemiskinan, perlu bantuan dalam bentuk lain sehingga penduduk miskin dapat sepenuhnya keluar dari kemiskinan. Adapun bantuan dalam bidang kesehatan dan pendidikan diharapkan juga mampu menanggulangi kemiskinan. Sehingga dalam jangka panjang, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan dapat hidup mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.

### 3.3 INDEKS KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN

Upaya penanggulangan kemiskinan tentu tidak hanya berfokus pada berapa jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Lebih daripada itu, penanggulangan kemiskinan harus meliputi beberapa aspek antara lain seberapa jauh jurang pendapatan si miskin terhadap nilai garis kemiskinan serta distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin.

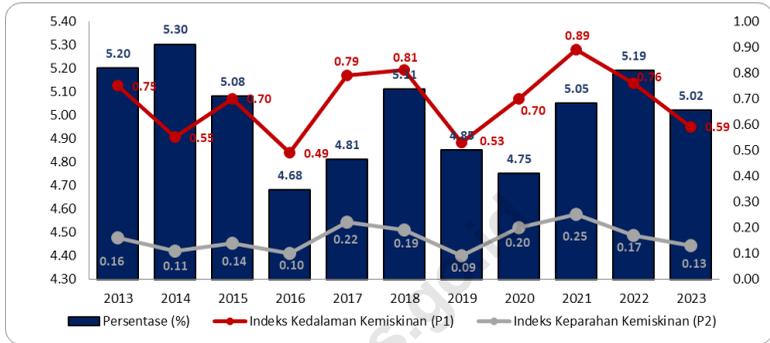
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ada tiga ukuran kemiskinan yang bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di suatu daerah. Ukuran tersebut adalah **Poverty Incidence ( $P_0$ )** merupakan ukuran yang menggambarkan prevalensi kemiskinan dalam suatu masyarakat. Angka ini memiliki kelemahan karena tidak menggambarkan seberapa parah kemiskinan yang terjadi di suatu daerah.

**Poverty Gap ( $P_1$ )**, mengukur seberapa jauh jurang/ gap pendapatan si miskin terhadap nilai garis kemiskinan, akan tetapi tidak menggambarkan jumlah penduduk miskin serta tidak terdeteksi distribusi antar penduduk miskin yang timpang.

Ukuran terakhir adalah **Poverty Severity ( $P_2$ )**, mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan mengukur ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin satu dengan penduduk miskin lainnya. Kelemahan dari  $P_2$  adalah tidak menggambarkan jumlah penduduk miskin.

Dalam analisis kemiskinan dan pengambilan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan, ketiga ukuran kemiskinan ini harus disertakan. Dengan mempertimbangkan ketiga ukuran tersebut, diharapkan kebijakan yang akan diambil dapat menyentuh seluruh aspek sehingga penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

**Gambar 3.3.** Perkembangan Persentase Penduduk Miskin ( $P_0$ ), Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) di Kota Batam periode Maret 2013–Maret 2023



Sumber: Susenas Maret 2013-Maret 2023

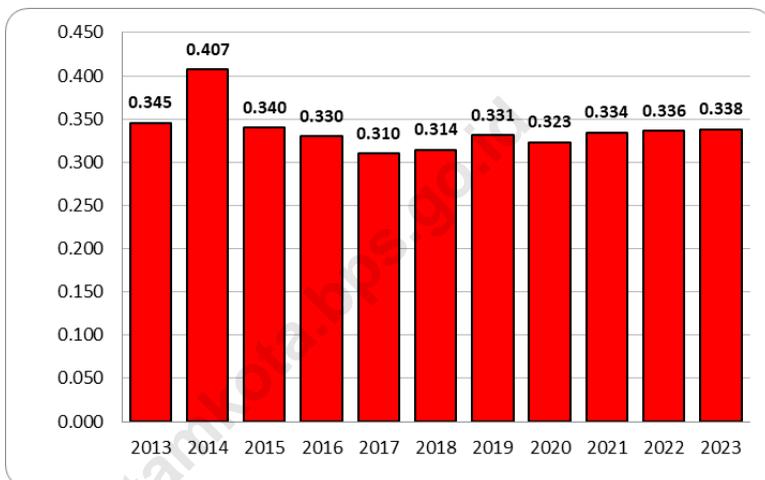
Selama periode Maret 2013 - Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) cukup berfluktuatif. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2013 sebesar 0,75 dan Maret 2023 mencapai 0,59. Demikian halnya dengan perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan yang mengalami fluktuasi dari 0,16 pada Maret 2013 kemudian turun menjadi 0,13 pada tahun 2023. Fluktuasi perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) serta perbandingannya dengan persentase penduduk miskin ( $P_0$ ) Kota Batam periode Maret 2013–Maret 2023 dapat terlihat pada Gambar 3.3 di atas.

### 3.4 GINI RATIO

Untuk melihat distribusi pengeluaran penduduk sekaligus melihat bagaimana pemerataannya, salah satu ukuran atau indikator yang dapat digunakan adalah *Gini Ratio*/ Rasio Gini. Dengan dihasilkannya angka Rasio Gini, akan terdeteksi bagaimana tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah. Nilai Rasio Gini selalu berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai Rasio Gini di bawah 0,3, dapat dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah tersebut rendah. Pada interval 0,3-0,5 dalam skala nilai Rasio Gini, ketimpangan pengeluaran penduduk di

suatu daerah adalah sedang, sedangkan dikatakan ketimpangannya tinggi jika nilainya di atas 0,5. Perkembangan nilai Rasio Gini Kota Batam masih dalam kategori sedang yang bergerak fluktuatif selama tahun 2013-2023 seperti pada Gambar 3.4 berikut.

**Gambar 3.4.** Rasio Gini Kota Batam Tahun 2013-2023



Sumber: Susenas Maret 2013-Maret 2023

# 4 PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN





## **BAB IV**

### **PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN**

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Disamping tersedianya data makro yang akurat, ketersediaan profil kemiskinan menjadi sangat penting agar kebijakan program intervensi pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.

Profil kemiskinan diharapkan dapat mengungkap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh penduduk miskin dan akar persoalan yang selalu menjerat penduduk miskin sehingga tidak mampu terbebas dari kemiskinan waktu ke waktu. Permasalahan yang dihadapi penduduk miskin dari segmen petani gurem misalnya, dapat berakar dari asetnya yang justru terlalu kecil ataupun dari persoalan alam dan infrastruktur yang tidak mendukung dan sebagainya. Akar permasalahan pedagang kecil, pengrajin kecil, buruh bangunan, pengangguran, buruh musiman, dan sebagainya bisa berbeda.

Profil kemiskinan juga diharapkan dapat mendukung usaha-usaha menurunkan kemiskinan agregat melalui sasaran wilayah geografis. Pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial demografi dan dimensi ekonomi penduduk miskin diharapkan mampu membantu perencanaan, pengawasan dan evaluasi dari program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien.

Profil kemiskinan semestinya dapat menyajikan informasi mengenai akar permasalahan yang dihadapi oleh berbagai segmen penduduk miskin dan sasaran geografis. Profil kemiskinan diharapkan mampu menjawab tentang apakah permasalahan lebih berakar pada orangnya, masalah infrastruktur/struktural atau masalah keterampilan, dan sebagainya. Informasi yang tersedia dalam Susenas tidak dapat

mengungkapkan persoalan tersebut secara tuntas, karena lebih merupakan informasi tentang karakteristik rumah tangga miskin. Namun demikian, perbedaan karakteristik rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin dapat mengungkap beberapa catatan mengenai persoalan mendasar kemiskinan.

#### 4.1 KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAFI

Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga/ ART dan rata-rata umur kepala rumah tangga/ KRT.

**Tabel 4.1.** Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin di Kota Batam, Maret 2023

<b>Karakteristik Rumah Tangga</b>	<b>Total</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
<b>Rata-rata Jumlah ART</b>	5,37
<b>Rata-rata Umur KRT (tahun)</b>	44,60

Sumber: Susenas Maret 2023

Penelitian tentang hubungan antara kemiskinan dan rata-rata jumlah ART menunjukkan bahwa rumah tangga miskin cenderung memiliki ART lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Dengan jumlah anggota rumah tangga yang cenderung banyak maka akan berdampak pada rendahnya kemampuan rumah tangga tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangganya. Dengan demikian, jumlah ART yang besar dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia masa depan, yang dimaksud dalam hal ini adalah anak-anak.

Dari tabel 4.1 di atas, terlihat secara rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin di Kota Batam pada tahun 2023 adalah 5,37 orang. Artinya dalam satu rumah tangga miskin terdiri atas 5-6 ART. Hal menarik lainnya adalah rata-rata umur KRT yang digunakan untuk melihat apakah kepala rumah tangga miskin masih dalam kategori umur yang produktif atau sudah tidak produktif. Ternyata rata-rata umur kepala

rumah tangga miskin berada pada 44,60 tahun atau masih dalam kategori Penduduk Usia Produktif.

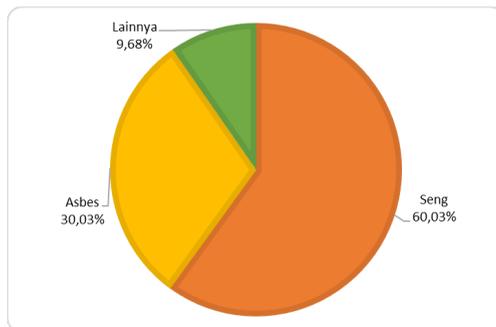
## 4.2 KARAKTERISTIK TEMPAT TINGGAL (PERUMAHAN)

Ada beberapa karakteristik yang menunjukkan apakah suatu rumah tangga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak. Selain karakteristik demografi, karakteristik tempat tinggal atau perumahan juga merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan rumah tangga miskin. Meskipun indikator tersebut tidak selalu sama di setiap daerah, namun mampu menjadi deteksi awal dari penentuan rumah tangga miskin atau tidak miskin.

### 4.2.1 JENIS ATAP TERLUAS

Gambar 4.1 menyajikan profil rumah tangga miskin menurut jenis atap rumah terluas. Dari gambar tersebut terlihat bahwa jenis atap seng merupakan salah satu profil rumah tangga miskin di Kota Batam mengingat persentase rumah tangga miskin dengan jenis atap seng merupakan yang tertinggi. Persentase rumah tangga miskin yang memiliki rumah dengan atap seng sebesar 60,03 persen, atap asbes sebesar 30,03 persen, sedangkan untuk atap lainnya (beton, genteng, bambu, kayu/ sirap, jerami/ ijuk/ rumbia) sebesar 9,68 persen.

**Gambar 4.1.** Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Atap Terluas di Kota Batam, Maret 2023

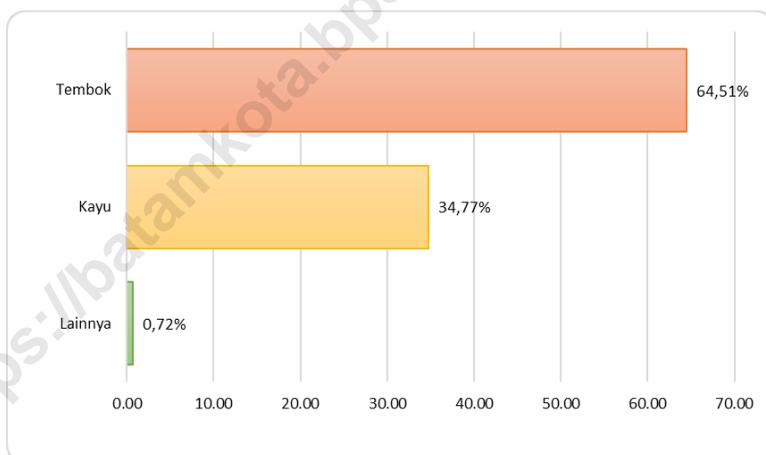


Sumber: Susenas Maret 2023

#### 4.2.2 JENIS DINDING TERLUAS

Jenis dinding merupakan salah satu indikator kemiskinan berikutnya yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan jenis dinding rumah, dari Gambar 4.2 berikut terlihat bahwa 64,51 persen rumah tangga miskin memiliki rumah yang berdinding tembok. Sedangkan 34,77 persen rumah tangga miskin, rumahnya masih berdinding kayu dan 0,72 persen memiliki jenis dinding lainnya termasuk plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu, batang kayu atau bambu.

**Gambar 4.2.** Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Batam, Maret 2023



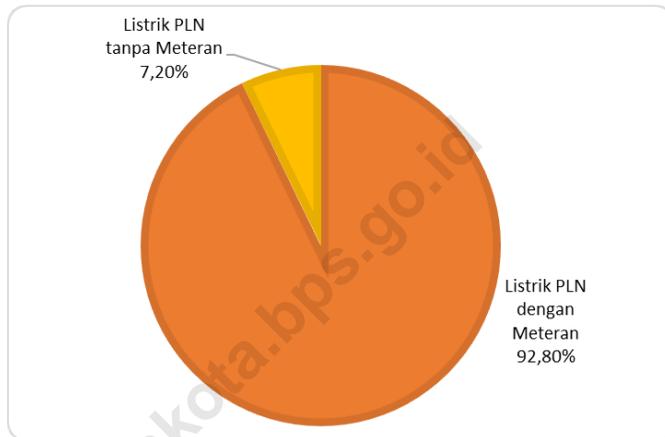
Sumber: Susenas Maret 2023

#### 4.2.3 JENIS PENERANGAN

Indikator perumahan lainnya adalah jenis penerangan rumah yang dibedakan atas listrik PLN dengan meteran dan listrik PLN tanpa meteran. Gambar 4.3 menyajikan persentase rumah tangga miskin menurut kedua jenis penerangan tersebut yaitu 92,80 persen rumah tangga miskin sudah menggunakan listrik PLN dengan meteran dan

rumah tangga miskin yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran masih ada sebesar 7,20 persen.

**Gambar 4.3.** Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Penerangan di Kota Batam, Maret 2023



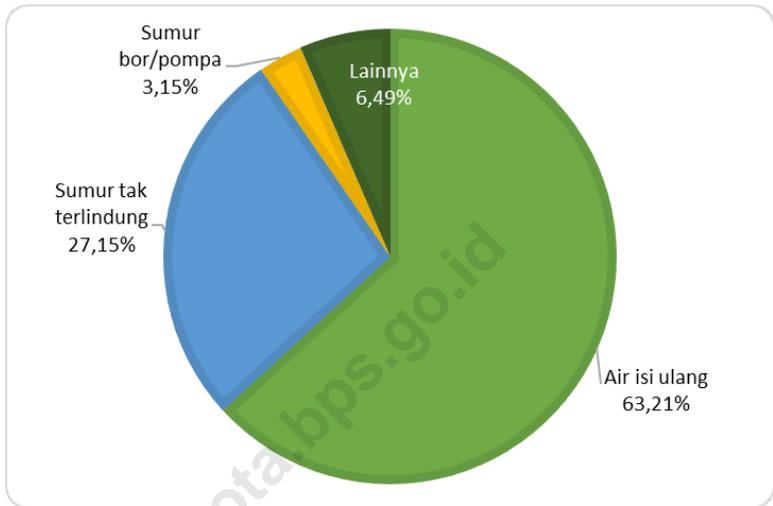
Sumber: Susenas Maret 2023

#### 4.2.4 SUMBER AIR MINUM

Ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga merupakan indikator perumahan yang juga dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Air bersih dalam uraian berikut didefinisikan sebagai air yang bersumber dari air kemasan bermerk/ air isi ulang/ leding/ PAM/ sumur terlindung/ mata air/ air permukaan/ air hujan/ lainnya. Ketidaktersediaan air bersih di rumah tangga adalah salah satu indikasi dari kemiskinan.

Berdasarkan Gambar 4.4, rumah tangga miskin di Kota Batam paling banyak menggunakan air yang berasal dari air isi ulang yaitu sebesar 63,21 persen. Selanjutnya, sumber air minum yang paling banyak kedua digunakan oleh rumah tangga miskin di Kota Batam adalah sumur tak terlindung yaitu sebesar 27,15 persen.

**Gambar 4.4.** Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Sumber Air Minum di Kota Batam, Maret 2023



Sumber: Susenas Maret 2023

#### 4.2.5 FASILITAS BUANG AIR BESAR

Ketersediaan fasilitas tempat buang air besar atau jamban menjadi salah satu indikator fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat. Di samping ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting yaitu dibedakan atas jamban sendiri (digunakan hanya oleh rumah tangga itu sendiri) atau jamban komunal/bersama.

**Gambar 4.5.** Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Kota Batam, Maret 2023



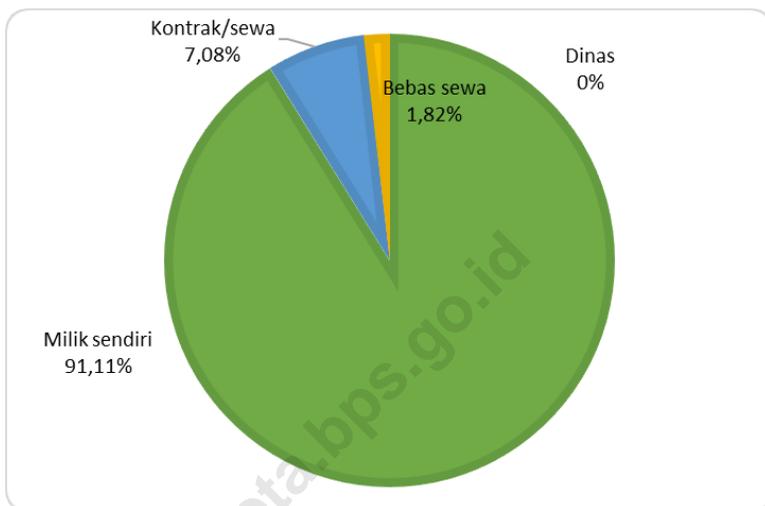
Sumber: Susenas Maret 2023

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas buang air besar, tampak bahwa semua rumah tangga miskin di Kota Batam sudah menggunakan jamban sendiri.

#### **4.2.6 STATUS KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL**

Jika melihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut status kepemilikan rumah sebagaimana tersaji pada Gambar 4.6, maka persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri sebesar 91,11 persen, sementara rumah tangga miskin yang menempati rumah kontrak/sewa hanya 7,08 persen, status kepemilikan rumah tempat tinggal bebas sewa masih ada 1,82 persen dan tidak ada rumah tangga miskin yang tinggal di rumah dengan status kepemilikannya rumah dinas.

**Gambar 4.6.** Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal di Kota Batam, Maret 2023



Sumber: Susenas Maret 2023

#### 4.2.7 LUAS LANTAI

Salah satu indikator perumahan yang diinginkan banyak orang adalah keleluasaan pribadi/ *privacy area* yang salah satunya dapat tercermin dari luas lantai rumah per kapita (dalam satuan m<sup>2</sup>). Salah satu acuan dari Kementerian Kesehatan menentukan bahwa suatu rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat jika penguasaan luas lantai rumah per kapita minimal 8m<sup>2</sup> (BPS, 2001). Tabel 4.2. berikut menyajikan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan luas lantai perkapita.

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut kategori luas lantai rumah per kapita, tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita kurang atau sama dengan 8m<sup>2</sup> di Kota Batam tercatat sebesar 17,57 persen. Sementara itu, rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita dalam rentang 8 hingga 15m<sup>2</sup> tercatat ada 77,90 persen, dan

hanya sebesar 4,53 persen rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita lebih dari 15m<sup>2</sup>.

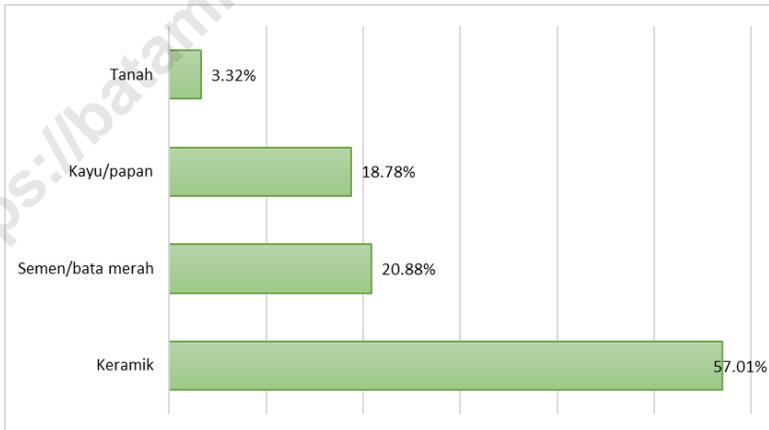
**Tabel 4.2.** Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Batam, Maret 2023

<i>Luas Lantai Per Kapita (m<sup>2</sup>)</i>	<i>Rumah Tangga Miskin (%)</i>
(1)	(2)
≤ 8m <sup>2</sup>	17,57
8m <sup>2</sup> < luas ≤ 15m <sup>2</sup>	77,90
> 15m <sup>2</sup>	4,53

Sumber: Susenas Maret 2023

#### 4.2.8 JENIS LANTAI TERLUAS

**Gambar 4.7.** Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Lantai Terluas di Kota Batam, Maret 2023



Sumber: Susenas Maret 2023

Gambar 4.7 di atas menyajikan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan jenis lantai rumah. Rumah tangga miskin dengan jenis lantai terluasnya berupa keramik menempati urutan pertama, yaitu

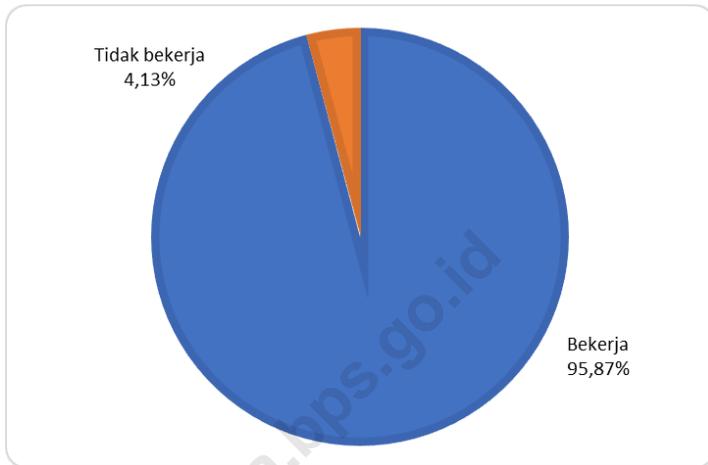
sebesar 57,01 persen, kemudian disusul dengan semen/bata merah 20,88 persen dan lantai terluas kayu/ papan sebesar 18,78%.

### **4.3 KARAKTERISTIK SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adalah status pekerjaan kepala rumah tangga. Bekerja dalam konsep Badan Pusat Statistik adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu sesuai dengan konsep ICLS-13. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Gambar 4.8 berikut memperlihatkan persentase kepala rumah tangga miskin yang berstatus bekerja sebanyak 95,87 persen. Sumber perekonomian rumah tangga akan sangat bergantung dengan pendapatan yang dihasilkan oleh kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan tidak selalu berarti rumah tangga tersebut akan lepas dari kemiskinan. Jika pendapatan yang dihasilkan oleh kepala rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan, maka rumah tangga tersebut masih dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

**Gambar 4.8.** Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Ketenagakerjaan Kepala Rumah Tangga di Kota Batam, Maret 2023

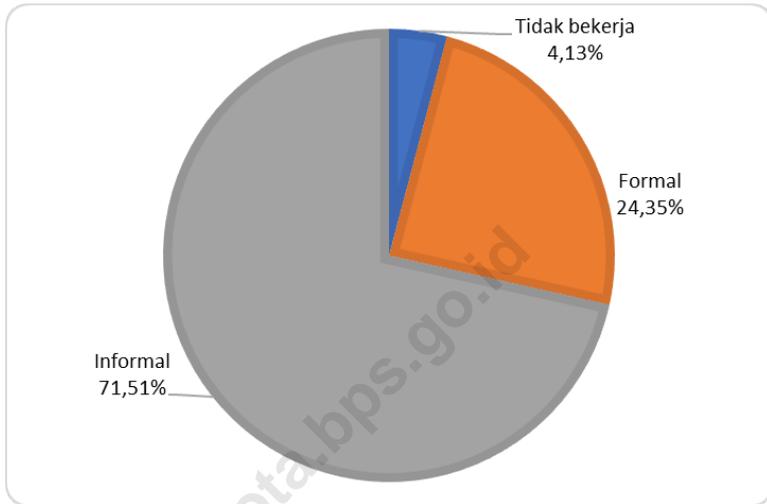


Sumber: Susenas Maret 2023

Distribusi rumah tangga miskin Kota Batam menurut status pekerjaan kepala rumah tangga disajikan pada Gambar 4.9. Status pekerjaan dibedakan dalam dua kategori, yaitu formal dan informal. Terdapat tujuh status pekerjaan yang dikumpulkan dalam Susenas 2023 ini, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di sektor pertanian, pekerja di sektor non pertanian dan pekerja tidak di bayar. Dari ketujuh kategori tersebut, **pekerja formal mencakup kategori berusaha dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan. Sedangkan sisanya termasuk pekerja informal.**

Dari Gambar 4.9 berikut terlihat bahwa sebanyak 71,51 persen kepala rumah tangga miskin yang bekerja terkategori sebagai pekerja informal. Pekerja informal adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan dan pendidikan yang tinggi. Sehingga sektor informal menjadi salah satu pilihan dari rumah tangga miskin untuk dapat tetap bekerja.

**Gambar 4.9.** Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga di Kota Batam, Maret 2023



Sumber: Susenas Maret 2023

Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah, Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian (termasuk perikanan) sebesar 43,67 persen sedangkan sektor industri 16,62 persen. Sektor industri merupakan sektor yang membutuhkan ketrampilan dan pendidikan yang memadai.

**Tabel 4.3.** Persentase Rumah Tangga Miskin Kota Batam menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, Maret 2023

<i>Jenis Lapangan Usaha</i>	<i>Rumah Tangga Miskin (%)</i>
(1)	(2)
<b>Pertanian</b>	43,67
<b>Industri</b>	16,62
<b>Lainnya</b>	35,56

Sumber: Susenas Maret 2023

#### 4.4 KARAKTERISTIK SOSIAL PENDIDIKAN

Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting, karena pendidikan sangat berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Dalam berbagai penelitian tentang pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan didapatkan hasil bahwa *orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin*. Secara tidak langsung, pendidikan yang tinggi akan memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji/pendapatan yang layak. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan melalui pendidikan diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan.

Karakteristik pendidikan yang diuraikan adalah persentase kepala rumah tangga miskin menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kepala rumah tangga adalah seseorang yang bertanggung jawab secara ekonomi terhadap anggota rumah tangganya, sehingga pendidikan kepala rumah tangga akan berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian rumah tangganya.

**Tabel 4.4.** Persentase Rumah Tangga Miskin Kota Batam menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga, Maret 2023

<b><i>Pendidikan Tertinggi</i></b>	<b><i>Total</i></b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
<b><i>Tidak Punya Ijazah</i></b>	<b>15,80</b>
<b><i>SD</i></b>	<b>48,70</b>
<b><i>SMP sederajat</i></b>	<b>11,60</b>
<b><i>SMA sederajat</i></b>	<b>19,80</b>
<b><i>Perguruan Tinggi</i></b>	<b>4,00</b>
<b><i>Total</i></b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas Maret 2023

Berdasarkan Tabel 4.5, secara umum dapat dilihat bahwa pada 48,70 persen rumah tangga miskin memiliki kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan tertinggi adalah ijazah SD, diikuti dengan Pendidikan tertinggi SLTA sebesar 19,80 persen.



# 5 PENUTUP





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Semoga publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kota Batam dapat menjadi salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan dan pihak lainnya untuk merumuskan solusi dalam pengentasan kemiskinan.



# INFOGRAFIS





# PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN, KOTA BATAM TAHUN 2013-2023



Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan satu individu dalam memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara 2100 kilokalori per kapita perhari & kebutuhan bukan makanan.





# KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAFI RUMAH TANGGA MISKIN, KOTA BATAM TAHUN 2023



Rata-rata Umur  
Kepala Rumah Tangga  
**44,60** Tahun

Rata-rata  
Banyaknya Anggota Rumah Tangga

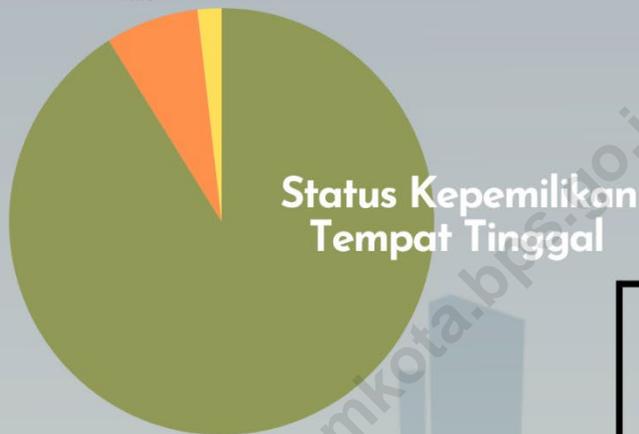
**5 - 6** Orang





# KARAKTERISTIK TEMPAT TINGGAL (PERUMAHAN) RUMAH TANGGA MISKIN, KOTA BATAM TAHUN 2023

Kontra/Sewa  
7.1%



Milik Sendiri  
91.1%

**Jenis Atap**  
**60,03%**  
Seng

**Jenis Dinding**  
**64,51%**  
Tembok

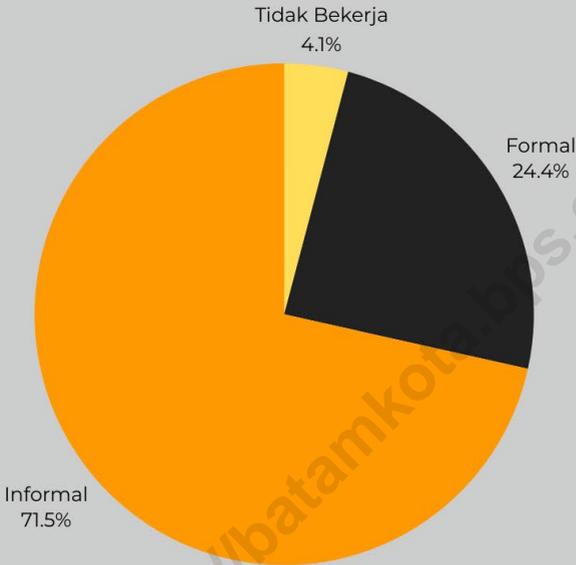
**Luas Lantai per Kapita**  
**77,90%**  
8 - 15 meter persegi

**Jenis Lantai**  
**57,01%**  
Keramik





# KARAKTERISTIK SOSIAL KETENAGAKERJAAN RUMAH TANGGA MISKIN, KOTA BATAM TAHUN 2023



Status Pekerjaan  
Utama KRT

## Lapangan Usaha Pekerjaan Utama KRT



**43,67%**  
Pertanian



**16,62%**  
Industri

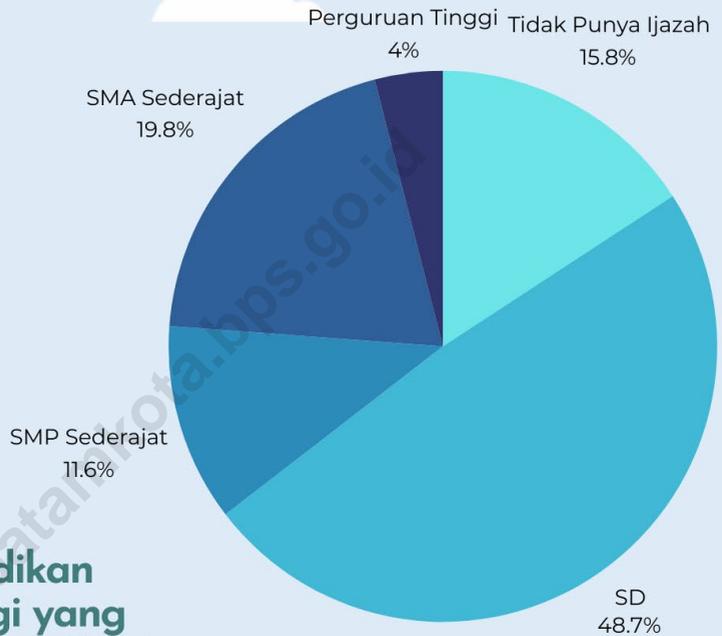


**35,56%**  
Lainnya





# KARAKTERISTIK SOSIAL PENDIDIKAN RUMAH TANGGA MISKIN, KOTA BATAM TAHUN 2023



**Pendidikan  
Tertinggi yang  
Ditamatkan KRT**







**ST 2023**  
**SENSUS PERTANIAN**

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BATAM**

Jl. Abuyaltama, Belian, Batam Kota, 29464  
Telp. (0778) 7433299, Fax. (0778) 7433299  
Homepage: batamkota.bps.go.id E-mail: bps2171@bps.go.id

ISSN 3031-3813

